

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN
DAERAH
(STUDI KASUS KABUPATEN MANOKWARI, KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN, KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK)**

Glerisida Kapitarauw, La Ode Alisyah*, Elina Situmorang
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Papua

*Corresponding Author
E-mail:
l.alisyah@unipa.ac.id

Abstract

Analysis of Financial Performance Before and After Regional Expansion, case studies in Manokwari Regency, South Manokwari Regency and Arfak Mountains Regency. This research aims to determine the Financial Performance of the Expansion Region by analyzing the Financial Independence and Dependence of the Expansion Region. Analyzed using the Quantitative Descriptive method, the results of this research show that the Financial Performance Analysis before and after the expansion of Manokwari Regency, which consists of the Independence Ratio and Dependency Ratio, is classified as instructive and very high, which means that the analysis of financial performance before and after the expansion of the Manokwari Regency area is said to be not yet independent and still dependent on transfer funds from the central government. The results of the Regional Financial Performance Analysis of South Manokwari Regency and Arfak Mountains Regency after being separated from Manokwari Regency, consisting of an independence ratio and a dependency ratio show that they are not yet independent and still depend on income from transfer funds from the central government.

Keywords: *Regional Expansion, Regional Financial Independence, Regional Financial Dependence*

Abstrak

Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah studi kasus di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran dengan menganalisis Kemandirian dan Ketergantungan Keuangan dari Daerah Pemekaran. Dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Analisis Kinerja Keuangan sebelum dan setelah pemekaran kabupaten manokwari yang terdiri dari Rasio kemandirian dan Rasio ketergantungan tergolong dalam kriteria instruktif dan sangat tinggi yang artinya Analisis kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran daerah Kabupaten Manokwari dikatakan belum mandiri dan masih bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat Hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak Setelah dimekarkan dari Kabupaten Manokwari, terdiri dari rasio kemandirian dan Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa belum mandiri dan masih bergantung dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat

Kata Kunci: *Pemekaran Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Lahirnya Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya (Halim, 2007). Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. konsekuensi dari kewenangan otonomi daerah yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim,2007).

Sistem Otonomi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah bertujuan agar adanya pemerataan politik dimana agar hak setiap warga atau masyarakat daerah dapat mendapatkan keadilan dalam menyampaikan pendapat. Setiap daerah juga dapat bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang dapat membuat kesadaran setiap daerah untuk meningkatkan potensi yang dimiliki.

Otonomi Daerah memiliki tiga prinsip penting yaitu, prinsip Otonomi seluas-luasnya, prinsip Otonomi nyata dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah seluas - luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang,

Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang serta kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang. Serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Dan Prinsip Otonomi Daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan.

Provinsi Papua Barat adalah suatu Daerah Otonomi, Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999. sejak tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007. Provinsi Papua Barat beribukota di Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 (Dua belas) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kota Sorong. Terdiri dari 162 Kecamatan, 74 Kelurahan, dan 1321 Kampung. Pada tanggal 17 Oktober 2022 telah disahkan yakni UU No 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri atas 6 wilayah yaitu Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Raja Ampat yang di Ibukotai oleh Kabupaten Sorong, jadi kini Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 wilayah Kabupaten diantaranya, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten FakFak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang di Ibukotai oleh Kabupaten Manokwari. Imelda Hutasoit (2015) mengatakan “Pemekaran Provinsi Papua Barat baik dilakukan karena dengan terjadinya pemekaran akan berdampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan dan pelayanan umum”

Kabupaten Manokwari, sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Pada Sejak masa kolonial Belanda, Manokwari telah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah Papua barat. Pada tanggal 8 November 1898, Manokwari resmi menjadi pos pemerintahan pertama di Papua, tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Manokwari.

Kabupaten Manokwari didirikan pada 10 September 1969, berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 1969. Kabupaten Manokwari Terdiri dari 9 Distrik, 9 kelurahan, dan 164 Kampung, 9 Distrik diantaranya Distrik Manokwari barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik

Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Masni, Distrik Prafi, Distrik Sidey, Distrik Warmare dan Distrik Tanah Rubuh. Yang memiliki luas wilayah 1.444.850 hektare pada tahun 2009 menurut laporan Slhd kabupatten Manokwari.

Pada tahun 2012 Kabupaten manokwari melakukan pemekaran menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan UU No 23 dan UU No 24 tentang pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Manokwari selatan yang memiliki luas wilayah 2.812,44 km² yang terdiri atas 6 Distrik diantaranya Oransbari, Ransiki, Tahota, Dataran Isim, Momi Waren, Neney dan 57 desa dan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan luas wilayah 3.298,81 km² terdiri atas 10 Distrik yaitu Distrik Anggi, Anggi Gida, Catubouw, Didohu, Hing, Membey, Minyambouw, Sururey, Taige, Testega dan 166 Kampung. Pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak dilakukan dengan harapan dapat melihat kemandirian keuangan daerah dengan melihat Seberapa besar daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dan juga melihat sejauh mana ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pemekaran suatu Daerah akan memberi pengaruh terhadap sistem Kinerja Keuangan Daerah baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pemakaran Daerah dapat berdampak baik jika Pemekaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan juga Pelayanan Publik, Pemekaran akan dikatakan berdampak buruk jika daerah tersebut hanya bergantung kepada Pendapatan Tranfer karena semakin banyak Pemekaran Daerah baru maka akan semakin tinggi jumlah Dana

Transfer dari pemerintah pusat dan itu akan berdampak negatif bagi APBD maupun APBN. Kinerja Keuangan suatu Daerah ada kemungkinan akan mengalami perubahan Ketika Daerah tersebut dimekaran, Kinerja Keuangan suatu Daerah dapat diukur menggunakan Rasio-rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah seperti Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kesenjangan, Rasio Ketergantungan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Pengukuran Kinerja Keuangan ini bertujuan untuk melihat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maupun Pusat dan juga dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk memperbaiki Kinerja Keuangan Daeranya.



Sumber: Bps Provinsi Papua Barat, dan Djpk Filter Data APDB (Data diolah 2024)

Gambar 1. Rata – rata Pendapatan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak Sebelum dan Setelah Pemekaran

Berdasarkan gambar 1. dapat dilihat rata-rata Pendapatan Daerah dari Kabupaten Manokwari Sebelum dan setelah pemekaran, dan juga rata-rata Pendapatan dari Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari sebelum melakukan pemekaran tahun Anggaran 2009-2011 memiliki rata-rata pendapatan sebesar 839,69 M dibandingkan dengan jumlah rata-rata pendapatan setelah pemekaran sebesar 1.378,61 M. Kenaikan ini dapat disimpulkan adanya efek positif dari pemekaran, yang mungkin disebabkan oleh adanya peningkatan alokasi anggaran, pengelolaan anggaran yang lebih baik atau peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan sebelum pemekaran.

Begitu juga dengan rata-rata pendapatan dari Kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten manokwari, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023 dengan jumlah rata-rata pendapatan 692,22 Miliar. Begitu juga dengan Kabupaten Pegunungan arfak yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari sejak 2012 Pada tahun 2021-2023 memiliki jumlah rata-rata Pendapatan daerah sebesar 897,84 M. Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki Jumlah Rata-rata pendapatan yang berbeda padahal kedua daerah tersebut dimekarkan bersamaan pada tahun 2011 mungkin karena adanya perbedaan

pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan mungkin pemerintah memerlukan perhatian lebih dalam terkait hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan fiskal untuk mencapai hasil yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemekaran daerah adalah pembagian suatu wilayah administratif (provinsi, kabupaten, atau kota) menjadi dua atau lebih wilayah administratif baru. Proses ini melibatkan pemisahan wilayah, sumber daya, dan juga kewenangan pemerintahan. bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan memperbaiki pelayanan publik. Pemekaran daerah dilandasai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan dasar bagi penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk pemekaran daerah. Pasal ini menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten atau kota yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri, mempunyai perwakilan rakyat daerah yang dipilih secara langsung, dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemekaran daerah dapat berdampak bagi kinerja keuangan daerah dan pembangunan dimana adanya ketergantungan fiskal jika ketergantungan daerah terhadap dana tranfer dari pemerintah pusat tinggi maka daerah tersebut memiliki tingkat ekonomi yang rendah karena daerah tersebut belum mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang signifikan dan itu beresiko tinggi kepada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis dan efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya dengan pendekatan rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2001).

Menurut Halim (2017), Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Pola hubungan yang ditimbulkan atas hasil rasio kemandirian laporan keuangan memiliki penjelasan mengenai seberapa mandiri pemerintah daerah mendanai daerahnya:

- 1) Pola Instruktif Pola ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih memerlukan banyak pengarahan dan juga petunjuk dari pemerintah pusat.
- 2) Pola Konsultatif Pola ini menilai adanya peningkatan kemampuan dari pemerintah daerah sehingga pengarahan dari pemerintah pusat berkurang.
- 3) Pola Partisipatif Pola ini menilai bahwa tingkat kemandirian dari pemerintah daerah semakin meningkat dan pengarahan dari pemerintah pusat berkurang, sehingga pemerintah daerah dapat dikategorikan hampir mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah.
- 4) Pola Delegatif Pola ini menandakan bahwa pemerintah daerah sudah bisa dikatakan mandiri untuk menjalani urusan pemerintahnya dan mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007), Rasio ketergantungan keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Asli Daerah), antara lain: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah

yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Perhitungan rasio keuangan ini yaitu untuk mengetahui berapa besar presentase ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat/ provinsi.

METODE PENELITIAN

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perhitungan rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian daerah dan rasio ketrgantungan daerah. enis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif Menurut Sugiyono (2018 data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positiftik (data konkrit), data penelitian berupa angka- angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Menurut Sugiyono (2018 data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja Maka Sumber data sekunder ini diperoleh dikantor BPS Provinsi Papua Barat dan Data Filter DJPK. Yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak. Perhitungan rasio kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Tranfer}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2007)

Gambar 2. Rumus rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah ini Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan /atau pemerintah propinsi. Secara umum, rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007) Keterangan:

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Metode perhitungan rasio ketrgantungan daerah menggunakan rumusa sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2007)

Gambar 3. Rumus Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Rasio ketergantungan keuangan daerah ini Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan /atau pemerintah propinsi. Secara umum, rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase Terhadap Total PAD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0.00 – 10.00	Sangat Rendah
10.01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bima dan Susanto (2017)

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik dokumentasi, menurut sugiyono (2013) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk Tulisan, gambar, atau karya- karya- monumental dari seseorang. Dengan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada seperti laporan, artikel, atau arsip

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011.

Karakteristik pendapatan daerah yang bervariasi dari tahun ke tahun, sumber pendapatan yang berasal dari PAD menunjukkan fluktuasi yang signifikan yang mencerminkan ketidakpastian dalam kebijakan pengelolaan pendapatan. Pendapatan Pajak yang relatif stabil pada tahun 2009-2010, namun mengalami penurunan di tahun 2011 ini menunjukan perlunya evaluasi dalam kebijakan perpajakan yang diterapkan. Pendapatan Retribusi juga menunjukan adanya ketidakpastian Pendapatan yang di peroleh tidak stabil dari tahun 2009-2011. sumber pendapatan daerah dari Dana Perimbangan menunjukan masih adanya ketergantungan yang tinggi dari pemerintah pusat sebab dari tahun 2009-2011menunjukan jumlah yang selalu bertambah yang menunjukan adanya peran pemerintah yang lebih dominan kepada pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Daerah dari DBH, DAU, dan DAK berada pada angka stabil menunjukan adanya stabilitas alokasi yang konsisten, dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011

Pendapatan Daerah	Tahun			Rata - Rata
	2009	2010	2011	
PAD	27.031.398.000	27.550.000.000	21.968.988.000	25.516.795.333
Pajak	5.283.161.000	6.186.000.000	6.382.065.000	5.950.408.667
Retribusi	3.477.338.000	4.314.000.000	3.314.000.000	3.701.401.333
Hasil Kekayaan Daerah	9.061.845.000	11.750.000.000	6.131.110.000	8.980.985.000
Lain-lain PAD yang sah	9.239.045.000	5.300.000.000	6.112.947.000	6.883.997.333
Pendapatan Transfer	545.727.750.000	573.030.664.000	618.521.740.000	579.093.384.667
DBH	90.580.117.000	115.320.000.000	102.181.458.000	102.693.858.333
DAU	395.180.806.000	390.174.154.000	443.987.821.000	409.780.927.000
DAK	51.963.000.000	53.596.500.000	60.673.600.000	55.411.033.333
Lain-lain Pendapatan Yang sah	306.678.568.000	174.310.206.000	224.253.886.000	235.081.220.000

Sumber: Data Diolah Excel (2024)

A. Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran Tahun 2021-2023

Berdasarkan Tabel 4 Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari setelah pemekaran Tahun 2021-2023. menggambarkan dinamika pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh beberapa sumber Pendapatan diantaranya, PAD, Dana Transfer, dan Lain – lain pendapatan daerah yang sah. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa Pendapatan daerah dari PAD khususnya pajak pada tiga tahun ini menjadi sumber pendapatan yang paling tidak stabil sedangkan sumber pendapatan dari dana transfer tetap stabil dan adanya pertumbuhan yang positif dalam pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi, yang menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran Tahun 2021-2023

Pendapatan Daerah	Tahun			Rata – Rata
	2021	2022	2023	
PAD	118.120.000.000	112.870.000.000	120.270.000.000	117.086.666.667
Pajak	71.010.000.000	61.250.000.000	63.940.000.000	65.400.000.000
Retribusi	3.840.000.000	5.770.000.000	8.780.000.000	6.130.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang sah	3.500.000.000	3.310.000.000	4.310.000.000	3.706.666.667
Lain – lain PAD yang sah	39.770.000.000	42.530.000.000	43.230.000.000	41.843.333.333
Pendapatan Transfer	671.743.293.000	777.173.681.000	859.125.283.000	897.005.511.667
DBH	20.842.004.000	52.091.465.000	53.800.913.000	42.244.794.000
DAU	507.833.489.000	491.575.047.000	533.928.292.000	511.112.276.000
DAK	88.707.132.000	134.638.872.000	271.396.078.000	164.914.027.333
Lain – lain Pendapatan Yang sah	81.220.000.000	52.700.000.000	35.730.000.000	56.550.000.000

Sumber: Data Diolah (2024)

B. Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023

Berdasarkan Tabel 5 Menunjukan Kabupaten Manokwari selatan Tahun 2021-2023 memiliki rata – rata pendapatan daerah yang mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa sumber, meskipun ada beberapa sumber pendapatan daerah seperti Retribusi dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, menunjukkan penurunan yang mencolok pada PAD sebab yang tercatat tidak ada pemasukan pada tahun 2022 hingga 2023. Penurunan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah. PAD yang mengalami penurunan pada tahun 2023 meskipun pada dua tahun sebelumnya memiliki jumlah yang stabil. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dilihat mengalami penurunan yang drastis sebab pada tahun 2023 tercatat tidak ada pemasukan.tetapi dari pada itu ada sumber pendapatan daerah dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang terus naik menunjukkan peran pemerintah pusat yang sangat signifikan dalam pendapatan daerah dan memiliki arti bahwa besarnya ketergantungan pemerintah daerah kepada Pemerintah pusat, Dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini:

**Tabel 5. Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
Tahun 2021-2023**

Pendapatan Daerah	Tahun			Rata - Rata
	2021	2022	2023	
PAD	9.620.000.000	9.260.000.000	7.460.000.000	8.780.000.000
Pajak	3.440.000.000	7.460.000.000	7.460.000.000	6.120.000.000
Retribusi	780.000.000	0	0	260.000.000
Hasil pengelolaan Kekayaan Yang sah	2.000.000.000	0	0	666.666.667
Lain – lain PAD yang sah	3.400.000.000	1.800.000.000	0	1.733.333.333
Pendapatan Transfer	402.432.527.000	435.174.336.000	718.930.102.000	518.845.655.000
DBH	12.691.000.000	42.949.963.0000	82.061.911.000	45.901.074.333
DAU	327.486.558.000	317.050.649.000	336.698.688.000	327.078.646.667
DAK	49.566.998.000	53.342.435.000	110.846.368.000	71.251.933.667
Lain – lain Pendapatan yang sah	5.570.000.000	0	1.900.000.000	2.490.000.000

Sumber: Data Diolah Excel (2024)

C. Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023

Berdasarkan Tabel 6 Menunjukkan Rata-rata Pendapatan Daerah dari Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023, beberapa sumber dari pendapatan daerah seperti PAD, dan pajak menunjukkan angka yang stabil namun pendapatan pajak mengalami penurunan pada tahun 2023. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang sah menjadi yang paling diperhatikan sebab tercatat tidak memiliki pemasukan dari tahun 2021-2023 dengan ini diartikan Kabupaten Pegunungan Arfak tidak memiliki penerimaan atas hasil dari penyertaan modal daerah. Pendapatan Dana transfer yang bersumber dari Pemerintah pusat menjadi sumber yang terus mengalami kenaikan setiap tahun dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat. Dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel 6. Karakteristik Pendapatan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak
Tahun 2021-2023**

Pendapatan Daerah	Tahun			Rata – Rata
	2021	2022	2023	
PAD	2.860.000.000	3.860.000.000	3.860.000.000	3.526.666.667
Pajak	2.210.000.000	2.210.000.000	1.780.000.000	2.066.666.667
Retribusi	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
Hasil pengelolaan kekayaan Yang sah	0	0	0	0
Lain – lain PAD yang sah	60.000.000	60.000.000	1.030.000.000	383.333.333
Pendapatan Transfer	484.261.562.000	531.193.511.000	597.401.678.000	537.618.917.000
DBH	15.107.141.000	44.375.648.000	81.134.227.000	46.872.338.667
DAU	355.097.234.000	344.097.123.000	363.163.580.000	354.119.312.333
DAK	93.651.576.000	110.010.271.000	153.103.871.000	118.921.906.000
Lain – lain Pendapatan yang sah	7.180.000.000	4.950.000.000	3.840.000.000	5.323.333.333

Sumber: Data Diolah Excel (2024)

II. Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Sebelum dan Setelah Pemekaran, Kabupaten Manokwari Selatan Dan Kabupaten Pegunungan Arfak

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersihnya. Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer. Dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini:

A. Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011.

Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari sebelum Pemekaran Berikut ini adalah Data Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Sebelum pemekaran Tahun 2009-2011.

Tabel 7. Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang sah
2009	879.438.716.000	27.031.398.000	545.727.750.000	306.679.568.000
2010	774.890.870.000	27.550.000.000	573.030.664.000	174.310.206.000
2011	864.744.614.000	21.968.988.000	618.521.740.000	224.253.886.000

Sumber: Data diolah Bps Provinsi dan Data Filter Djpk

Berdasarkan Tabel 7 Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011, Terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun, pendapatan tertinggi terlihat pada Tahun 2009, Namun 2010 mengalami penurunan dengan jumlah Rp.774.890.870.000 dan Kembali meningkat pada tahun 2011, begitupun dengan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009-2010 menunjukkan pendapatan yang tetap stabil dengan jumlah Rp.27.031.398.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menunjukkan ada usaha yang lebih baik dari pemerintah dalam mengelola sumber PAD. Dana transfer memiliki jumlah yang selalu naik setiap tahun menunjukkan adanya dukungan yang terus menerus dari pemerintah pusat kepada daerah.

B. Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran Tahun 2021-2023

Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari setelah Pemekaran tahun 2021-2023, Berikut ini adalah Data Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Setelah pemekaran Tahun 2021-2023. dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang sah
2021	118.120.000.000	71.010.000.000	671.743.293.000	3.500.000.000
2022	112.870.000.000	61.250.000.000	777.173.681.000	3.310.000.000
2023	120.270.000.000	63.940.000.000	859.125.283.000	4.310.000.000

Sumber: Data diolah Bps Provinsi dan Data Filter Djpk

Berdasarkan tabel 8 Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari setelah pemekaran Tahun 2021-2023 terdapat peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik dalam pengelolaan pendapatan daerah, Namun PAD mengalami

penurunan pada tahun 2021 dengan jumlah Rp.71.010.000.000 M mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah Rp.61.250.000.000 dan Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 ini menunjukkan adanya usaha pemerinitah daerah dalam mengoptimalkan sumber sumber PAD setelah pemekaran, dengan adanya peningkatan yang terus menerus dari dana transfer menunjukkan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat kepada daerah namun mengartikan pemerintah daerah yang memilki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

C. Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023

Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023 sebagai Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari. Berikut ini dapat dilihat pada adalah Data Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023.

Tabel 9. Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2021	629.280.000.000	9.620.000.000	402.432.527.000	5.570.000.000
2022	653.890.000.000	9.260.000.000	435.174.336.000	0
2023	793.510.000.000	7.460.000.000	718.930.102.000	1.900.000.000

Sumber: Data diolah Bps Provinsi dan Data Filter Djpk.

Berdasarkan Tabel 9 menunjukan Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023 Sebagai Kabupaten yang dimekarkan dari kabupaten manokwari memiliki jumlah Pendapatan Daerah yang mengalami kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pendapatan Daerah meningkat dari Rp.629,28 M pada tahun 2021 menjadi Rp.793,51 M pada tahun 2023 Menunjukan adanya pertumbuhan yang signifikan dari kabupaten manokwari selatan. Jumlah PAD dari daerah yang baru dimekarkan ini memilki jumlah yang belum stabil sebab mengalami penurunan dari tahun 2021-2023 hal ini menunjukan adanya tantangan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Maka dengan adanya dana transfer yang terus meningkat setiap tahun menunjukan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah pronvinsi atapun pusat. komponen penting dalam pendapatan daerah, terutama mengingat penurunan PAD, terlihat pada sumber pendapatan lain-lain Pendapatan yang sah pada tahun 2022 tercatat tidak memilki masukan ini menunjukan adanya ketidakpastian dan perlu adanya peninjauan terhadap sumber pendapatan ini.

D. Pendapatan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023

Pendapatan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023 sebagai Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari. Berikut ini adalah Data Pendapatan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023.

Tabel 10. Tabel Pendapatan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang sah
2021	757.870.000.000	2.860.000.000	484.261.562.000	7.180.000.000
2022	870.310.000.000	3.860.000.000	531.193.511.000	4.950.000.000
2023	1.065.340.000.000	3.860.000.000	968.349.822.000	3.840.000.000

Sumber: Data diolah Bps Provinsi Dan Data Filter Djpk.

Berdasarkan Data pada Tabel 10 Pendapatan daerah dari Kabupaten Pegunungan Arfak pada tahun 2021-2023 menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif karena adanya peningkatan yang signifikan dari pendapatan daerah, pendapatan daerah meningkat dari Rp.757,87 M pada tahun 2021 menjadi Rp.1,06 M pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan baik dalam pengelolaan pendapatan. PAD Kabupaten Pegunungan Arfak tetap stabil Pada Tahun 2021 Rp. 2,86 M dan naik pada Tahun 2022-2023 dengan jumlah yang stabil. meskipun masih relatif kecil dibandingkan dengan total Pendapatan daerah. Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah pusat mencerminkan dukungan terus menerus dari pemerintah pusat dan pendapatan ini menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah, terutama PAD yang masih terbatas, dan dana pendapatan lain-lain yang sah dari kabupaten pegunungan arfak menunjukkan ketidakstabilan atau terdapat masalah karena tercatat terus mengalami penurunan tahun 2021 sebesar Rp.7,18 M kemudian pada tahun 2023 tercatat hanya sebesar Rp.3,84 M hal menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan atau pengembangan sumber pendapatan baru.

III. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis Kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Maka berikut ini dapat dilihat Hasil Analisis Rasio kemandirian keuangan daerah dari Kabupaten Manokwari Sebelum hingga setelah pemekaran dan Analisi Rasio Kemandirian Keuaangan daerah Dari Kabupaten Manokwari Selatan Dan Kabupaten

Pegunungan Arfak sebagai kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari. Berikut untuk mengetahui Kemandirian Keuangan Daerah dengan menggunakan Rumus Rasio Kemandirian dibawah ini:

A. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran Tahun 2009-2011

Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio kemandirian keuangan daerah dari Kabupaten Manokwari sebelum Pemekaran Untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari kabupaten manokwari sebelum pemekaran dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari Sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2009	27.031.398.000	545.727.750.000	4,95	Instruktif
2010	27.550.000.000	573.030.664.000	4,80	Instruktif
2011	21.968.988.000	618.521.740.000	3,55	Instruktif
Rata – Rata Rasio			4,43	Instruktif

Sumber: Data Diolah Excel (2024)

Berdasarkan hasil Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran tahun 2009-2011 rata-rata adalah 4,43%, hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menurut kategori kemandirian kabupaten manokwari sebelum pemekaran masuk dalam kategori Instruktif atau berada di bawah 25%. Hal ini menandakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat kabupaten manokwari pada tahun 2009-2011 dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

B. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari setelah pemekaran Tahun 2021-2023

Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio kemandirian keuangan daerah dari Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari kabupaten manokwari setelah pemekaran dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari setelah Pemekaran Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2021	118.120.000.000	671.743.293.000	17,58	Instruktif
2022	112.870.000.000	777.173.681.000	14,52	Instruktif
2023	120.270.000.000	859.125.283.000	13,99	Instruktif
Rata- Rata Rasio			15,39	Instruktif

Sumber: Data Diolah Excel (2024)

Berdasarkan hasil Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran Tahun 2021- 2023 Rata-rata Rasio adalah 9,82%. hal ini menunjukkan ada peningkatan dari waktu sebelum pemekaran. Namun masih terhitung relatif sangat rendah, untuk melihat kemandirian dalam Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menurut kategori Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah hasil ini dikategorikan Instruktif atau berada di bawah 25%. Kategori tersebut menunjukkan masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebab PAD setelah pemekaran tahun 2021-2023 rata-rata PAD sebesar Rp.117.086.666.667 maka sama halnya dengan penelitian yang di lakukan oleh Zesmi Kusmila, Mukhzarud Fa Dan Yudi (2018) dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi sebelum dan setelah Pemekaran Wilayah” memperoleh hasil tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dalam bentuk kemandirian kabupaten pemekaran pada sebelum dan setelah pemekaran yang ada di Provinsi Jambi.

C. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023

Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio Kemandiriaan Keuangan Daerah dari Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021- 2023. untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2021-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio (%)	Kriteria
	(Rp)	(Rp)		
2021	9.620.000.000	402.432.527.000	2,39	Instruktif
2022	9.260.000.000	435.174.336.000	2.12	Instruktif
2023	7.460.000.000	718.930.102.000	1,03	Instruktif
Rata – Rata Rasio			1,85	Instruktif

Berdasarkan hasil Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2021-2023. Menunjukkan hasil rata- rata adalah 1,31% atau sama dengan dibawah 25% maka kriteria yang ditetapkan sebagai instruktif yang menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah terhitung sangat rendah. meskipun Pendapatan Asli Daerah relatif stabil selama tiga tahun terakhir, namun tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023 Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio kemandirian keuangan daerah dari Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk mengetahui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun anggaran 2021-2023.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio (%)	Kriteria
	(Rp)	(Rp)		
2021	2.860.000.000	484.261.562.000	0,59	Instruktif
2022	3.860.000.000	531.193.511.000	0,72	Instruktif
2023	3.860.000.000	597.401.678.000	0,64	Instruktif
Rata – Rata Rasio			0,65	Instruktif

Berdasarkan Hasil Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2021-2023, menunjukkan hasil rata- rata kemandirian 0,39%. Ini diartikan bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023 terlihat sama

sekali tidak memiliki kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemasukan dari PAD pada tahun tersebut relatif sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan daerah, dengan jumlah rata – rata PAD hanya Rp.3.526.666.667 M namun dengan adanya Pendapatan dari dana transfer sebesar Rp.888.990.000.000 M, Hal tersebut yang dapat menjadi yang lebih dominan untuk membantu kebutuhan daerah

IV. Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Analisis ketergantungan keuangan daerah adalah analisis untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Analisis ini dilakukan dengan menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah. Maka berikut ini dapat dilihat Hasil Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dari Kabupaten Manokwari Sebelum hingga setelah pemekaran dan Analisi Rasio Ketergantungan Keuaangan daerah Dari Kabupaten Manokwari Selatan Dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari.

A. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011.

Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio ketergantungan keuangan daerah dari Kabupaten Manokwari Sebelum Pemekaran Tahun 2009-2011. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 15 berikut ini:

Tabel 15. Tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran Tahun anggaran 2009-2011

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2009	545.727.750.000	879.438.716.000	62,05	Sangat Tinggi
2010	573.030.664.000	774.890.870.000	73,94	Sangat Tinggi
2011	618.521.740.000	864.744.614.000	71,52	Sangat Tinggi
Rata-Rata Rasio			71,53	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Excel (2024)

Berdasarkan hasil Analisis Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran Tahun 2009-2011. Rata-rata Rasio Ketergantungan sebesar 71,53% Yang menunjukan bahwa Kabupaten Manokwari memiliki ketergantungan keuangan daerah yang sangat sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Rata – rata PAD pada tahun 2009-2011

adalah Rp.25.516.795.333 M memiliki jumlah yang sangat rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp.579.093.384.667 M. maka kabupaten manokwari sebelum pemekaran tergolong memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap dana transfer.

B. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran Tahun 2021-2023

Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio ketergantungan keuangan daerah dari Kabupaten Manokwari Setelah Pemekaran Tahun 2021-2023. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini:

Tabel 16. Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari setelah pemekaran Tahun 2021-2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2021	671.743.293.000	1.263.660.000.000	53,15	Sangat Tinggi
2022	777.173.681.000	1.332.360.000.000	58,33	Sangat Tinggi
2023	859.125.283.000	1.539.810.000.000	55,79	Sangat Tinggi
Rata-Rata Rasio			55,76	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Excel (2024)

Berdasarkan hasil dari Analisis Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan daerah Kabuapten Manokwari setelah pemekaran tahun 2021-2023. Rata-rata sebesar 55,76% dikategorikan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat, dan dari rata-rata tersebut menunjukkan masih rendahnya kontribusi dari pendapatan asli daerah. Maka sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Benta Palantama Putra dan Retno Ulfayatun Hidayah Pada Tahun 2020 dengan Judul Penelitian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota sebelum dan setelah pemekaran Daerah sumatera selatan memperoleh hasil dari rasio ketergantungan keuangan daerah tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sebelum dan setelah pemekaran dikarenakan pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah tidak mengalami perubahan.

D. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023

Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio ketergantungan keuangan daerah dari Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2021-2023. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun anggaran 2021-2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2021	402.432.527.000	629.280.000.000	63,95	Sangat Tinggi
2022	435.174.336.000	653.890.000.000	66,55	Sangat Tinggi
2023	718.930.102.000	793.510.000.000	90,60	Sangat Tinggi
Rata – Rata Rasio			73,70	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Excel (2024)

Berdasarkan Hasil Analisis Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2021-2023, menunjukkan Rata-rata ketergantungan adalah 98,32% artinya Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagai daerah yang dimekarkan biasanya memiliki kebutuhan untuk membangun Infrastruktur dasar dan dana transfer menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan. Dan faktor lain dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pendapatan yang tidak stabil, sebagai daerah baru seringkali belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menghasilkan pendapatan sendiri ini bisa disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya investasi atau potensi ekonomi daerah yang belum digali.

D. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023

Tabel Berikut ini adalah Tabel Analisis Rasio ketergantungan keuangan daerah dari Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2021-2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2021	484.261.562.000	757.870.000.000	63,89	Sangat Tinggi
2022	531.193.511.000	870.310.000.000	61,03	Sangat Tinggi
2023	597.401.678.000	1.065.340.000.000	56,07	Sangat Tinggi
Rata – Rata Rasio			60,33	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah Excel (2024)

Berdasarkan Hasil Analisis Tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2021-2023. Menghasilkan Rata – rata Rasio sebesar 98,98%. Hal menunjukan Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki Ketergantungan Keuangan daerah Yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Sebab sumber pendapatan daerah dari Tahun 2021-2023 tidak dapat membantu daerahnya sendiri namun jumlah Pendapatan Dana transfer yang dominan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelolah kinerja keuangan daerah maka kabupaten pegunungan arfak memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Kesimpulan

1. Analisis Kinerja Keuangan sebelum dan setelah pemekaran kabupaten manokwari yang terdiri dari Rasio kemandirian dan Rasio ketergantungan tergolong dalam kriteria instruktif dan sangat tinggi yang artinyan Analisis kinerja keuangan sebelum dan setelah pemekaran daerah Kabupaten Manokwari dikatakan belum mandiri dan masih bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
2. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak Setelah dimekarkan dari Kabupaten Manokwari, terdiri dari rasio kemandirian dan Rasio ketergantungan menunjukan bahwa belum mandiri dan masih bergantung dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat .

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hutasoit, Imelda (2015) Potensi Pemekaran Provinsi Papua Barat Ditinjau Dari Aspek Kependudukan (Demografi
- Kusmila, Z., Mukhzarudfa, M., & Yudi, Y. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jambi Sebelum dan Setelah Pemekaran Wilayah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3(5), 27-39.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: PenAndhi. Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 10-15.
- Putra, B. P. (2019). Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Pemekaran Daerah. *Jurnal Fairness*, 138, 139 dan 140.
- Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta